

Tasrifin Tahara¹

Pemilu Legislatif dan Kebangkitan Identitas Kelompok Marginal

Abstract

The article discusses the rise of the Katobengke people's identity in the Buton social structure during the Legislative Election in 2004 and 2009 in Bau-bau town. The people perceive the elections as self-representation arena as a group to be given attention in the power context in Buton. In the Buton's society the Katobengke people are classified as marginalized papara group as constructed since the Sultanate period which is dominated by the kaomu, and walaka groups.

During the 2009 general election, a number of Katobengke people became the candidates during the town and provincial elections. The election is perceived as the time of identity rise of the people of Katobengke which consists 20% voters in the town of Bau-bau. The people of Katobengke is using creatively their cultural identity in the political participation to have their representative in Bau-bau town parliament.

(Keywords: marginal group, general election, and identity)

Pendahuluan

Pengetahuan tentang masyarakat yang ada di dalam wilayah Kesultanan Buton berdasarkan tulisan-tulisan ilmunan sejak dari Ligvoet (1878), Berg (1937, 1939, 1940), Schoorl (1985, 1987), Zuhdi ((1999), dan Rudyansyah (1997, 2008) sudah banyak membantu kita dalam memahami hakekat struktur sosial dan ideologi kekuasaan dalam masyarakat ini. Secara harfiah, kata 'Buton' memiliki banyak arti. Pertama, 'Buton' berarti 'Pulau Buton', yang terletak di Semenanjung Sulawesi Tenggara. Kedua, 'Buton' secara wilayah yang terdiri atas beberapa bagian selatan Pulau Buton, dan bagian selatan Pulau Muna, Kepulauan Tukang Besi, Pulau Kabaena, dan beberapa pulau kecil, dan sebagian dari Semenanjung Sulawesi Tenggara. Dahulu, daerah-daerah tersebut berada di bawah kekuasaan Kesultanan Buton, yang berpusat di Keraton Wolio. Tidak ada bahasa pemersatu untuk masyarakat Buton (selain Bahasa Indonesia); dan orang-orang Buton menggunakan lebih dari 14 bahasa (Lihat Zahari 1977; Fox 1995).

Naskah-naskah Buton menunjukkan bahwa Kerajaan Buton muncul pada abad ke-14 (lihat Zahari 1977, Yunus 1995, Zuhdi 1999). Selama abad ke-17, ke-18, dan ke-19, Kesultanan Buton berupaya menjadi kerajaan yang merdeka. Pada awal abad ke-20 pemerintah Hindia Belanda mencampuri interen kesultanan, dan swapraja Buton tentu merupakan bagian wilayah jajahan. Dasar-dasar mulai diletakkan untuk perkembangan sosiobudaya dan ekonomi terutama yang berkaitan dengan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ini satu langkah menuju keterpaduan sepenuhnya dalam sistem sosio politik Hindia, dan setelah tahun 1949 dalam negara

¹ Staf Pengajar Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

Indonesia. Keterpaduan ini mencapai puncaknya pada tahun 1960 dengan bubarnya kesultanan beberapa bulan setelah wafatnya sultan ke-38 Laode Muhammad Falihi sebagai sultan terakhir dan Kesultanan Buton dibubarkan.

Sejak masa kesultanan, sistem sosial masyarakat Buton terdiri atas tiga kelompok, yaitu *kaomu*, *walaka*, dan *papara*. Sistem ini dibangun sebagai ideologi kekuasaan dalam sistem politik masyarakat Buton pada masa pemerintahan Sultan ke IV Dayanu Ikhsanuddin pada tahun 1578 – tahun 1615. Schoorl (1985) menyebut sistem sosial tersebut dengan *rank*. Menurut Rudyansyah (1997), *kaomu* dan *walaka* di satu sisi merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan Bahasa Wolio dan asal usulnya jelas, dan *papara* merupakan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan Bahasa Wolio dan asal usulnya tidak jelas. Yamaguchi (2001) mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem yang didasarkan pada perbedaan fungsi dan peranan pada Kesultanan Wolio, yakni kelompok *kaomu* merupakan kelompok masyarakat dari pada sultan yang diseleksi dan membentuk kelompok eksekutif. Sedangkan *walaka* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki hak untuk menyeleksi para sultan dan membentuk legislatif, dan kelompok masyarakat *papara* membentuk kelompok produktif.

Pada masa kesultanan, idealnya tidak ada perbedaan kelas atau stratifikasi sosial di kalangan ketiga kelompok tersebut, dan kelompok *kaomu* dan *walaka* merupakan kelompok masyarakat yang memiliki asal usul yang sama. Kelompok masyarakat *kaomu* dan *walaka* memiliki fungsi untuk saling mengawasi sistem politik di Kesultanan Wolio, sehingga sistem politik pada saat itu dikatakan demokratis. Demokrasi dalam Kesultanan Wolio dapat dilihat pada sistem pemilihan sultan. Dengan kata lain, sultan-sultan dari Kesultanan Wolio telah dipilih melalui pemilihan dan konferensi yang dilakukan di kalangan pejabat pemerintahan kesultanan yang berasal dari kelompok *kaomu* dan *walaka*, sementara kelompok *papara* merupakan kelompok pekerja dan budak dari kedua golongan tersebut. Dalam sebuah masyarakat yang memiliki kelompok sosial, kebudayaan dari masing-masing kelompok berisikan konsep-konsep mengenai berbagai kelompok yang hidup bersama dalam masyarakat tersebut. Hal-hal yang tercakup dalam konsep-konsep kebudayaan tersebut adalah sifat-sifat atau karakter dari masing-masing kelompok tersebut. Isi dari konsep-konsep atau pengetahuan yang ada dalam kebudayaan dari masing-masing kelompok adalah pengetahuan mengenai diri atau kelompok masing-masing, sebagai pertentangan atau lawan dari kelompok-kelompok lain. Ini dilakukan untuk memunculkan keberadaan kelompok sosial dalam interaksi antar anggota kelompok yang berbeda.

Pelapisan Sosial Sebagai Proses Marginalisasi

Sistem pelapisan sosial pada masyarakat Buton; *kaomu*, *walaka*, dan *papara*, mulai dikenal sejak masa pemerintahan Sultan ke IV yaitu Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615) merupakan proses marginalisasi antar kelompok. Sistem pelapisan antar kelompok ini dibangun sebagai ideologi kekuasaan dalam sistem politik masyarakat Buton pada masa pemerintahan. Schoorl (1986) menyebut sistem sosial tersebut dengan *rank*. Menurut Rudyansyah, *kaomu* dan

walaka di satu sisi merupakan kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Wolio dan asal usulnya jelas, dan *papara* merupakan kelompok masyarakat yang tidak menggunakan bahasa Wolio dan asal usulnya tidak jelas.²

Schoorl mengatakan, lapisan tertinggi ialah *kaomu*, yakni “ningrat atau bangsawan”. Ini mencakup keturunan dari garis bapak pasangan raja pertama. Para penguasa (sultan) dipilih dari *kaomu* itu. Kemudian berkembang kebiasaan melekat sebuah gelar di depan nama para anggota golongan masyarakat itu. Kaum laki-laki diberi gelar La Ode dan perempuan bergelar Wa Ode. Di Kesultanan Wolio, gelar-gelar tertentu disediakan untuk anggota lapisan masyarakat ini.³ Saya menemukan versi sejarah bahwa gelar La Ode berasal dari bahasa Cina yaitu *Laodse* yang bermakna orang yang didiapkan untuk berkorban demi kepentingan umum.⁴ Pada masa Sultan Sangia Manuru, seorang ulama bernama Saidi Raba atau Syarif Ahmad yang pertama kali menyebut anak sultan dengan panggilan La Ode dan Wa Ode sehingga menjadi gelar yang diberikan kepada semua kelompok *kaomu*.

Lapisan kedua disebut *walaka*. Dalam sejumlah dokumen yang lebih tua, seperti *Sarana Wolio* (konstitusi), tertanggal paruh pertama abad ke-19, istilah *maradika* (orang merdeka) juga dipergunakan. Mereka diturunkan dari garis bapak para pendiri Kesultanan Buton melalui suatu sistem perkawinan –seorang laki-laki *kaomu* dapat mengawini seorang perempuan *walaka*– mereka berhubungan erat dengan golongan bangsawan itu. Beberapa kedudukan tertentu juga tersedia untuk lapisan sosial ini. Para wakil *walaka* dapat memilih atau memecat seorang penguasa.⁵

Lapisan ketiga dalam masyarakat di Kesultanan Wolio ialah penduduk desa yang dinamakan *papara*. Secara teoritis, mereka hidup dalam komunitas desa yang agak bebas dan dinamakan *kadie*. Di *kadie* ini mereka berpeluang punya jabatan dalam organisasi desa. Akan tetapi, mereka tidak diperhitungkan menduduki jabatan penting di kesultanan. Kelompok keempat dalam masyarakat Buton terdiri dari para budak: *batua*. Barangkali tidak terlalu cepat menggambarkan mereka sebagai satu lapisan dalam masyarakat. Namun, mereka membentuk satu lapisan, baik di pusat kesultanan dan di desa-desa. Mereka diperlakukan sebagai budak belian dan senantiasa bergantung pada pemilik mereka.

Menurut Rudyansjah (1997), pembagian kelas ini didasarkan pada kejelasan status dan asal-usul. Pembagian ini didefinisikan secara sederhana ke dalam kategori orang Wolio dan bukan-Wolio. Dua kategori sosial yang pertama, yakni *Kaomu* dan *Walaka*, termasuk ke dalam

² Lihat Rudyansyah, Tony (1997) *Kaomu, Walaka, dan Papara: satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio*, Jurnal Antropologi Indonesia No. 52

³ Schoorl (1986) “*Power, Ideology and Change in The Early State of Buton*”, fifth Duthch-Indonesian Historical Congress, Netherland, 23-27 June.

⁴ Lihat Moersidi (1951) *Susunan masyarakat Buton dan Perkembangannya*. Draft yang tidak diterbitkan. Saya rasa kata *Laodse* yang konon berasal dari bahasa Cina ini harus diamati kembali. Saya menduga jangnan-jangan kata ini berasal dari kata Laotze yang merupakan sosok bijak dalam tradisi filsafat Cina. Mungkinkah nama Laotze yang tiba di Buton sehingga nama itu diberikan kepada semua *kaomu*?

⁵ Schoorl (1986)

kategori orang Wolio. Sebaliknya dua kategori sosial yang terakhir, yakni *Papara* dan *Batua*, termasuk ke dalam kategori bukan orang Wolio.

Perbedaan antara satu lapisan dan lainnya dipertahankan oleh sistem perkawinan dan kekeluargaan. Kedua sistem ini antara lain mengatur tempat seseorang dalam masyarakat yang bergantung pada garis keturunan melalui bapak. Seorang laki-laki dapat kawin dengan seorang perempuan dari lapisan yang lebih rendah, namun tidak sebaliknya. Jika seandainya seorang perempuan dari lapisan *kaomu* atau *walaka* melanggar peraturan ini, ia dapat dikenai hukuman mati. Kaum laki-laki diperbolehkan mempunyai beberapa istri, dan laki-laki kaya juga sering punya istri banyak dari lapisan yang lebih rendah ketimbang dari golongan mereka sendiri.

Dengan cara ini, jaringan keluarga dibentuk dan dipertahankan, yang menyebar ke desa-desa dan golongan-golongan yang lebih rendah. Sultan bahkan dibolehkan lebih dari itu. Pada kesempatan pelantikannya sebagai sultan, ia diberi dua belas perempuan yang disebut *belo baruga* (bunga-bunga dari balai sidang). Mereka ini para gadis dari lapisan papara yang berasal dari dua belas desa berlainan. Mereka akan dijadikan selir, namun hanya bila sultan berkenan. Ini disadari demi meningkatkan keterpaduan dalam kesultanan (Van den Berg 1939: 521-522, Andaya 1975:45).

Zahari (1977) mengatakan, papara terdiri atas tiga golongan yaitu:

1. Papara bangsa “paraka”, ialah mereka yang datang menyerahkan dirinya kepada syarat Buton dengan tidak melalui perang. Dikenal mereka ini dengan rakyat yang diperintah oleh Siolipuna, karena daerah Siolipuna takluk dibawah kekuasaan Buton atas kemauannya sendiri. Daerah-daerah Siolipuna itu adalah: Kamaru, Batauga, Waaleale, Wawoangi, Tumada, Bombonawulu, Wolowa, Todanga, dan Bola.
2. Papara bangsa “talubirana”, ialah mereka yang berasal dari tawanan perang,
3. Papara bangsa “kantinalo”, ialah mereka yang berasal budak beliau yang menaklukkan diri pada orang-orang yang berkuasa.

Siapa Orang Katobengke?

Di manakah posisi masyarakat Katobengke? Jika mengacu pada penjelasan di atas, maka masyarakat Katobengke dimasukkan dalam kelompok masyarakat papara yang menetap di wilayah *kadie*. Di masa silam, posisi mereka adalah sebagai pekerja yang digaji oleh bangsawan kaomu ataupun walaka sehingga posisi mereka sangat dekat dengan kelompok *kaomu* maupun *walaka*.. Artinya, mereka lebih mewakili karakter para pekerja profesional ketimbang seorang budak. Dalam tradisi Kesultanan Buton, mereka-mereka yang berhak mempekerjakan orang *papara* ini hanya kaum bangsawan, *kaomu* dan *walaka*. Dalam tradisi Wolio, kaum *papara* ini berasal dari Sara Pancana yang dibawa oleh Murhum, sebagaimana nampak dalam syair berikut:

“Baabana papara lipuna sara,
Osiytumo wakafuna Murhum”

Artinya:

“Mula pertamanya papara dari negeri sara

Itulah wakafnya Murhum.”

Murhum adalah Sultan Buton I yang merupakan putra Raja Muna bernama Sugimanuru. Murhum naik tahta pada tahun 1522 setelah sebelumnya mengalahkan seorang bajak laut asal Tobelo yaitu La Bolontio. Mengacu pada catatan sejarah, ketika Murhum menjadi Sultan Buton, jabatannya sebagai Raja Muna diserahkan kepada adiknya *La Posasu Kobangkuduna*. Dalam perjalanannya kembali sesudah penyerahan jabatan Raja Muna kepada adiknya Murhum berjalan melalui Mawasangka dan Gu. Rakyat kedua negeri ini menyatakan keinginannya untuk mengikuti terus pada Murhum dan masuk dalam daerah Kerajaan Buton.

Beberapa lamanya, timbul keributan di Muna oleh karena rakyat tidak mematuhi lagi La Posasu sebagai Raja Muna. Untuk mengembalikan keamanan di Muna, Murhum berangkat lagi ke Muna tetapi kedatangannya ini mendapat tantangan dari syarat Muna dengan perlawanan melalui kekuatan senjata. Tetapi karena keberanian dan pengalaman perang dari pribadi Murhum, maka beliau dapat memenangkan pertempuran yang terjadi dengan syarat Muna sehingga syarat Muna kembali mengakui La Posasu sebagai raja.

Oleh karena kemenangan Murhum ini, maka sebagaimana permintaan rakyat Gu dan Mawasangka kepada Murhum untuk mengikuti masuk kerajaan Buton, bertambah yakin dan percaya mereka akan kebesaran Murhum. Pada waktu Murhum kembali ke Buton dibawanya serta *syarat pancana*, kemudian Gu dan Mawasangka diberi nama "*pancana*" asal kata *paincana*, sebagai tanda kemenangan Murhum dalam perangnya dengan Syarat Muna.

Jika mengacu pada syair sebagaimana disebutkan di atas, kelompok papara adalah wakaf dari Murhum. Ini bermakna bahwa kelompok papara mencakup sejumlah orang yang dulunya dibawa oleh Murhum dari daratan Muna. Saat tiba di Buton, mereka memiliki demikian banyak faedah atau manfaat bagi warga setempat. Hal ini bisa dilihat dari syair berikut:

*“papara yitu abari faedana
Amfadyana inda tokera-kera
Apaincana bangusaana lalaki
Apatiumba kamiaayana mangaanaana.”*

Artinya:

Papara itu banyak faedanya
Kegunaannya tidak terhingga
Mewujudkan kebesaran Sultan
Menyatakan kebangsawanan para bangsawan

Orang Katobengke adalah bagian dari etnis Buton yang memperkukuh keragaman tersebut. Dari sisi adat-istiadat, orang Katobengke tak berbeda dengan etnis lainnya pada wilayah eks Kesultanan Buton. Namun dari sisi bahasa, bahasa yang digunakan orang Katobengke masih lebih dekat dengan bahasa Muna ketimbang bahasa daerah lainnya di Buton. Namun orang Katobengke senantiasa menolak klaim yang melihat mereka sebagai bagian dari etnis Muna tersebut. Mereka mengajukan versi bahwa nenek moyang mereka adalah sama dengan nenek moyang orang Buton yang berasal dari negeri Johor. Setiap pembicaraan tentang sejarah asal

muasal orang Katobengke, maka pembicaraan itu tak bisa lepas kaitannya dengan sejarah masyarakat Buton secara keseluruhan. Sejumlah tokoh masyarakat Katobengke meyakini bahwa nenek moyang orang Katobengke sama dengan nenek moyang masyarakat Buton lain, yang merupakan pendatang dari Johor (Malaysia), yang kemudian membangun perkampungan dan selanjutnya menjadi Kerajaan Buton pada sekitar abad ke-13.

Lantas bagaimana posisi orang Katobengke dalam struktur sosial orang Buton? Seorang informan mengatakan bahwa di kalangan masyarakat Buton lainnya, beredar anggapan bahwa orang Katobengke adalah golongan *batua* yang disebut-sebut sebagai lapis terbawah dari stratifikasi sosial orang Buton. Katanya, anggapan ini masih dipertahankan sebagian kalangan di Buton, apalagi jika melihat pendidikan orang Katobengke yang rendah sehingga sehari-harinya, mereka hanya menjalani kerja kasar. Harisu – mantan Lurah Melai dan pernah menjadi lurah di Kelurahan Katobengke selama tujuh tahun-- mengatakan bahwa Kelurahan Katobengke telah terisolasi dan tingkat pendidikannya rendah hingga tahun 1980-an. Bahkan sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa di kelurahan tersebut merupakan bayang-bayang bahwa Katobengke tertinggal, ini diperoleh terutama pada masyarakat atau orang-orang diluar kelompok *kaomu dan walaka*. Image tersebut didasarkan pada fakta bahwa masyarakat Katobengke berasal dari kelompok “*papara*”. “*Papara*” kadang ditunjukkan sebagai status rendah seperti “hina” di masyarakat Indian, bahkan sebenarnya hanya merupakan orang awam dan masyarakatnya tidak menggunakan bahasa Wolio.

Selain para masa melaksanakan tugas-tugas di Kesultanan, orang Katobengke juga berperan sebagai *ama laode – ina laode* (ayah laode) untuk kaum laki-laki, sedangkan perempuan dijuluki “*inana laode*” (ibu laode). Julukan ini muncul karena mereka adalah perawat anak-anak dari kelompok *kaomu dan walaka* pada masa kesultanan. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, masyarakat di Katobengke dikelompokkan ke dalam kelompok *papara*, masyarakat umum.

Sebagaimana dikisahkan bahwa terbentuknya Kesultanan Buton berawal dari kedatangan imigran asal Johor yang dikenal dengan nama *mia patamiana* yang berjumlah empat orang bersama sejumlah pengiringnya. Keempat orang tersebut adalah Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati, Sitamanajo. Merekalah yang kemudian menjadi cikal-bakal lahirnya kesultanan.

Nenek moyang orang Katobengke, datang bersamaan dengan datangnya empat tokoh tersebut. Menurut seorang informan, pelayan dari Sipanjonga dan Sijawangkati yang semula dikenal dengan nama ‘*Rakia*’ tidak ikut pindah ke perkampungan yang dibentuk *mia patamiana*, namun mereka memilih tinggal sekitar beberapa kilometer dari pantai. Mereka lalu membangun perkampungan yang disebut ‘Lipu Morikana’. Di perkampungan ini, mereka lalu membuka lahan kering tersebut dengan menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi kayu.

Namun, fungsi mereka sebagai pelayan/pembantu majikannya tetap dilaksanakan dalam bentuk menyediakan bahan makanan bagi mereka yang tinggal di Wolio dan juga kaum-kaum ibu mereka tetap menjadi pengasuh anak-anak majikannya, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan “*ina laode*” dan “*ama laode*”.

Ada juga fungsi lain orang Katobengke sebagai Bantena Wolio. Posisi ini diberikan tanggung jawab bagi semua wilayah kadie. Namun bagi orang Katobengke tanggungjawabnya menjadi “Bante”. Bante itu ada istilah Santiago yang bertugas pada saat menjelang Idul fitri dan Idul Adha, mereka melakukan ritual menyiram kuburan. Saat itu ada *kompanyia*. Kompanyia ini terdiri dari tujuh orang; yakni empat orang *Saraginti*, satu orang *Alfirisi*, satu orang *Lutnani*, dan satu orang *Tamburu* (budak). Pada saat ritual ini berlangsung, orang Katobengke bertugas memegang tempat duduk *Alfirisi*.

Posisi lain juga bagi masyarakat Katobengke Sebagai Pertahanan Keamanan. Pada masa kesultanan peran orang Katobengke sangatlah besar sebab fungsi mereka adalah sebagai penjaga pertahanan di dalam benteng atau “matana sorumba.” Pada Prinsipnya bahwa sistem pertahanan yang diterapkan oleh pemerintah Kesultanan Buton tidak berdiri sendiri melainkan satu kesatuan yang tak terpisahkan antara *Barata*, *Matana Sorumba*, *Pata Limbona*, maupun pertahanan *Bhisa Patamiana* dengan menerapkan sistem pertahanan rakyat semesta secara keseluruhan, tak terkecuali bila ada gangguan, serangan dari pihak musuh maka secara spontan seluruh lapisan masyarakat mengambil bagian untuk berjuang menghancurkan musuh dalam rangka mempertahankan Kesultanan Buton. Posisi orang Katobengke pada masa silam adalah sebagai *matana sorumba yinunca* atau pertahanan di dalam kesultanan. Mereka adalah prajurit yang bertugas untuk melindungi sultan dan semua warga di dalam istana.

Pemilu dan Kebangkitan Identitas Katobengke

Pemilu legislatif adalah tahap pertama dari rangkaian tahapan Pemilu 2004. Pemilu legislatif ini diikuti 24 partai politik, dan telah dilaksanakan pada 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada Pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama secara langsung. Tahap kedua ini dilaksanakan pada 5 Juli 2004. Selanjutnya, pada tahap ketiga (atau pemilu presiden putaran kedua) adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 persen (Bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi, bila pada Pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden). Tahap ketiga ini dilaksanakan pada 20 September 2004.

Sejak pelaksanaan Pemilihan Umum Indonesia tahun 1999 sangat bermakna bagi orang katobengke sebagai Kelompok marginal dalam struktur masyarakat Buton. Ini merupakan moment dimana pada pemilu pertama yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi memilih dan dipilih sebagai anggota legislatif. Selain itu, mereka juga sudah bisa memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari pemilu sebelumnya. Seperti

rakyat lain di Indonesia, pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) -- pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.

Awal kebangkitan identitas orang Katobengke dengan terpilihnya salah satu putra asli LKB yang berhasil menjadi anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera, kemudian pada tahun 2004-2009 pindah ke Partai Bulan Bintang (PBB). Kemunculan LKB sebagai anggota DPRD Kota Bau-Bau Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap dominasi kelompok lain yang selalu mengangga orang Katobengke sebagai budak. Menurut LKB isu budak bagi orang Katobengke muncul pada saat ada kepentingan politik, dan karena terlalu lama orang Katobengke didiskriminasi, makanya pada saat pemilu 1999 jumlah suara yang diperoleh oleh LKB sangat fantastis sebesar 3.447 suara.

Kemudian pada pemilu legislatif 2009, jumlah orang Katobengke yang berpartisipasi sebagai calon legislatif bertambah banyak sampai berjumlah 22 orang yang berasal dari berbagai partai. Namun alhasil, hanya La AD yang berhasil lolos sebagai legislatif Kota Bau-Bau dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan 412 suara. Kejadian ini merupakan pelajaran bagi orang Katobengke, karena sulitnya memperoleh suara yang solid karena suara terpecah.⁶

Pemilu bagi orang Katobengke merupakan wujud reaksi kelompok Katobengke terhadap rasa ketidakadilan dan marjinalisasi secara ekonomi yang dilakukan oleh negara atau kelompok penguasa. Terganggunya rasa aman, rasa keadilan dan ketidakpastian, mendorong kelompok masyarakat untuk menyesuaikan diri baik secara individual maupun secara kolektif. Eriksen (1993) mengemukakan bahwa terdapat keterkaitan antara meningkatnya kesadaran identitas kelompok atau etnik ketika mereka berada dalam tekanan. Bangkitnya kesadaran itu muncul pada saat melemahnya control koesif oleh negara. Situasi ini memicu secara seketika “bara dalam sekam”. Berbagai kelompok marginal yang sebelumnya tertindas dan termarjinalisasi seketika mempunyai kesempatan untuk menkonsolidasikan diri dan melakukan unjuk kekuatan. Mereka kemudian berusaha memasuki wilayah-wilayah sosial, ekonomi, dan politik yang selama ini tak tersentuh baik karena didominasi oleh negara maupun didominasi oleh kelompok lain.

Bangkitnya kembali kesadaran identitas kelompok Katobengke dalam masyarakat Buton seringkali bermotif “perjuangan untuk mendapatkan pengakuan” baik dari kelompok-kelompok lain maupun dari pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk memperluas partisipasi sosial kelompok dalam ruang publik yang dirasakan tidak adil sehingga mampu menaikkan posisi tawar mereka terhadap kelompok lain dalam struktur masyarakat Buton (horizontal) maupun terhadap pemerintah (vertikal). Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan seringkali dimanifestasikan dalam gerakan politik identitas, yaitu gerakan yang melibatkan pembuatan

⁶ Kondisi ini semakin buruk dengan tidak solidnya suara dan peran tokoh adat sudah tidak berperan, selain itu juga munculnya “money politik” sehingga ada sebagian caleg yang berasal dari kelompok lain (bukan orang Katobengke) berhasil memperoleh suara dari kelompok Katobengke.

identitas secara sadar, melalui pemobilisasian simbol-simbol kebudayaan yang dianggap sebagai milik masyarakat yang berbeda dengan kelompok lain. Dalam hal ini politik identitas yang dimunculkan tidak hanya sebagai keluhan terhadap viktimisasi tetapi juga merupakan perjuangan untuk melakukan demistifikasi, yaitu menentang stereotipe yang negatif dan merendahkan kelompok Katobengke. Dengan demikian, pergerakan tersebut sangat sadar diri tentang identitas, kebudayaan, dan asal usul dan kadangkala dengan perasaan senasib sebagai kelompok orang-orang yang terbuang, tereksplotasi, terpinggirkan, dan termiskinkan.

Penutup

Tradisi perbudakan yang dahulunya marak di kesultanan, jejaknya seolah melekat pada diri orang Katobengke hingga masa kini. Label itu masih dipertahankan sehingga menempatkan posisi orang Katobengke pada lapis terbawah stratifikasi kuasa di Pulau Buton. Dan di masa kini, pandangan-pandangan itu masih dikemukakan sejumlah orang yang beralih atas nama sejarah. Saya akan mengacu pada metodologi *oral history* demi mengungkap *the history from below* atau sejarah dari bawah yang disusun berdasarkan kesaksian masyarakat biasa yang banyak diabaikan oleh para sejarawan Buton lainnya.

Posisi sejarah di sini adalah demi menemukan makna-makna yang bertebaran di sepanjang lintasan waktu. Saya memandang posisi orang Katobengke hari ini adalah akumulasi dari dinamika dan interaksi yang berjalan sejak masa silam. Posisi mereka yang marginal adalah buah dari proses-proses sejarah yang mereka jalani sehingga memberikan kemampuan pada mereka untuk menegosiasikan posisinya, kemudian memberikan horizon pandang kesejarahan tertentu yang melihat sejarah dari pinggiran dan selama ini terabaikan dalam berbagai studi tentang sejarah. Berubahnya sistem politik dari masa kesultanan sampai masa reformasi RI dengan munculnya sistem pemilu sejak tahun 1999 merupakan moment penting bagi orang Katobengke untuk melakukan perlawanan dan kebangkitan identitas terhadap dominasi kelompok lain pada masa lalu.

Daftar Pustaka

Barth, Fredrik, ed. 1969 "Introduction", in *Etnick Groups and Bouderies*. Boston: Little Brown

Bourdieu, Pierre, 1977, *Outline of a Theory of Practice*, University of Cambridge

Eriksen, T.Hylland 1993 *Ethnicity and Nationalism; Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press

Fox, JJ, 1995 'Foreword' dalam M. Soulthson (peny.) *The Navel of perahu: Meaning and Values in The Maritime Trading Economy of a Butonese Village*. Canberra; Department of Anthropology Australian national University

- Lawang, Robert M.Z, 2004. *Stratifikasi Sosial di Cacer Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*, FISIP UI Press
- Rudyansyah, Tony 1997, *Kaomu, Walaka, dan Papara: Satu Kajian Mengenai Struktur Sosial dan Ideologi Kekuasaan di Kesultanan Wolio*, Jurnal Antropologi Indonesia No. 52
- Saifuddin, A.F. 2005 *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- Schoorl, JW, 1985. 'Belief in Reincarnation on the Island of Buton, Southeast Sulawesi', *Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde*, Deel 141
- 1986. 'Power, Ideology and Change in The Early State of Buton', *fifth Dutch-Indonesian Historical Congress, Netherland, 23-27 June*.
- Soulthson, M 1995, *The Navel of The Perahu: Meaning and Values in The Maritime Trading Economy of Butonese Village*. Canberra: ANU
- Tsing, Anna Lowenhaupt, 1993 *In The Realm of the Diamond Queen, Marginality in an Out the Way Place*, Princeton University Press
- Winn, Phillip, 2008 Butonese in the Banda Island: Departure, Mobility, and Identification, in *Horizon of Home: Nation, Gender, and Migrancy in island Southeast Asia*, Edited by Penelope Graham, Monash Asia Institute, Clayton
- Yamaguchi, Hiroko 2001, Interim Report, "*A Study on Cultural Representations of The Historical Past in Buton Society, Southeast Sulawesi*", Department Of Anthropology Hitotsubashi University Tokyo Japan
- Yunus, A.R. 1995 *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton Pada Abad ke-19, Seri INIS; jil 24*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies
- Zahari, Mulku 1977, *Sejarah dan Adat Fiy darul Butuuni*, Koleksi Pribadi Belum dipublikasikan
- Zuhdi, Susanto 1999 *Labu Wana Labu Rope: Sejarah Buton Abad XVII-XVIII*. Disertasi Program Doktor Ilmu Sejarah Pascasarjana FIB Universitas Indonesia, Depok